



Penerapan Prinsip Etika Keadilan dalam Praktik Jurnalistik Radio Digital di Era Multimedia

Application of the Ethical Principle of Fairness in Digital Radio Journalism Practice in the Multimedia Era

Firmansyah^{1*}, Muhammad Anshar Akil²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: firmansyahneeds@gmail.com¹, anshar.akil@uin-alauddin.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

The development of digital technology has driven the transformation of journalistic practices, including in radio media, which has now evolved into multimedia-based digital radio. These changes not only affect the production and distribution of information but also present various ethical challenges in the implementation of journalistic functions. This study aims to analyze the application of ethical principles of justice in digital radio journalistic practices in the multimedia era, particularly those related to balance, the right of reply and the right of correction, and the accuracy and verification of information. The research method used is a descriptive qualitative approach with a library research type. Data were obtained through a review of various national journals discussing digital journalism, media ethics, digital radio, and the development of multimedia media in Indonesia. The results of the discussion indicate that the ethical principles of justice remain an important foundation in digital radio journalistic practices despite changes in work patterns due to technological developments. The application of the principles of balance, the right of reply and the right of correction, and the accuracy and verification of information play a role in maintaining the quality and credibility of reporting. However, the implementation of these principles faces various challenges, such as the dilemma between speed and accuracy of information, algorithmic pressure and competition for audience attention, and efforts to implement the right of reply and the right of correction in the digital era. These findings indicate that the success of digital radio journalism is not only determined by the ability to utilize multimedia technology, but also by the commitment to applying ethical principles of justice in order to fulfill the public's right to correct, balanced, and accountable information.

Keywords : journalistic Ethics, journalistic justice, digital radio

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi praktik jurnalistik, termasuk pada media radio yang kini berkembang menjadi radio digital berbasis multimedia. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi proses produksi dan distribusi informasi, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan etis dalam pelaksanaan fungsi jurnalistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip etika keadilan dalam praktik jurnalistik radio digital di era multimedia, khususnya yang berkaitan dengan keberimbangan, hak jawab dan hak koreksi, serta akurasi dan verifikasi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian berbagai jurnal nasional yang membahas jurnalistik digital, etika media, radio digital, dan perkembangan media multimedia di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip etika keadilan tetap menjadi landasan penting dalam praktik jurnalistik radio digital meskipun terjadi perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi. Penerapan prinsip keberimbangan, hak jawab dan hak koreksi, serta akurasi dan verifikasi informasi berperan dalam menjaga kualitas dan kredibilitas



pemberitaan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti dilema antara kecepatan dan akurasi informasi, tekanan algoritma dan persaingan perhatian audiens, serta upaya penerapan hak jawab dan hak koreksi di era digital. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan jurnalistik radio digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan teknologi multimedia, tetapi juga oleh komitmen dalam menerapkan prinsip etika keadilan guna memenuhi hak masyarakat atas informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Etika jurnalistik, keadilan jurnalistik, radio digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar terhadap cara media menjalankan fungsi jurnalistiknya. Radio yang dulu dikenal sebagai media siaran satu arah melalui gelombang frekuensi, kini sudah berubah menjadi radio digital yang dapat diakses melalui berbagai platform seperti streaming, website, aplikasi, hingga media sosial. Perubahan ini membuat radio tidak lagi berdiri sendiri sebagai media audio, tetapi sudah masuk ke dalam ekosistem multimedia yang lebih kompleks. Kondisi ini tentu membawa dampak pada praktik jurnalistik yang dijalankan, termasuk dalam hal penerapan prinsip-prinsip etika.

Salah satu prinsip yang menjadi perhatian penting dalam jurnalistik adalah prinsip etika keadilan. Dalam praktiknya, keadilan dalam jurnalistik sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan informasi yang berimbang, tidak memihak, serta memberi ruang yang sama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Namun, dalam konteks radio digital di era multimedia, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Tekanan kecepatan informasi, kebutuhan untuk mengikuti tren digital, serta tuntutan untuk terus aktif di berbagai platform membuat proses jurnalistik sering kali berada dalam situasi yang serba cepat.

Di sisi lain, media digital menuntut adanya distribusi informasi yang lebih luas dan cepat. Berita tidak hanya disiarkan melalui siaran radio konvensional, tetapi juga dipotong menjadi konten pendek untuk media sosial, dipublikasikan dalam bentuk artikel di website, bahkan disebarluaskan dalam format audio-visual di platform video. Perubahan bentuk distribusi ini membuka peluang besar bagi media untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam menjaga konsistensi nilai-nilai jurnalistik, terutama prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa proses keberimbangan informasi menjadi lebih singkat karena tekanan waktu. Jurnalis dituntut untuk segera mempublikasikan berita agar tidak tertinggal dari media lain. Kondisi ini dapat berpotensi mengurangi proses verifikasi dan pendalaman informasi dari berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya, prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam pemberitaan dapat mengalami pergeseran dalam implementasinya.

Menurut Sari dan Wibowo (2023), tanggung jawab sosial media dalam menyajikan informasi yang adil dan berimbang kini harus beradaptasi dengan dinamika media digital yang menuntut kecepatan, sehingga sering kali menimbulkan dilema antara ketepatan waktu dan kedalaman isi berita. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan bukan hanya sekadar nilai tambahan, tetapi merupakan bagian penting dari fungsi media itu sendiri, namun penerapannya kerap menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Selain itu, dalam era multimedia, audiens juga memiliki peran yang semakin aktif. Interaksi melalui komentar, like, share, dan respons publik lainnya sering kali memengaruhi arah



pemberitaan media. Tidak jarang media menyesuaikan konten berdasarkan respons audiens, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keseimbangan dalam penyajian informasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jurnalistik tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang redaksi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ruang publik digital.

Hidayat (2024) menegaskan bahwa regulasi dan pedoman etika jurnalistik di Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan penyajian informasi yang independen dan berkeadilan, namun penerapannya di ruang multimedia memerlukan penafsiran ulang agar tetap relevan dengan karakter media yang berubah menjadi lebih terbuka dan interaktif. Prinsip keadilan menjadi landasan utama agar media tetap menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, radio digital sebagai bagian dari media multimedia memiliki tantangan tersendiri. Radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan karakteristik platform digital yang cepat, interaktif, dan berbasis visual. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian dalam cara kerja jurnalistik, termasuk dalam menjaga prinsip-prinsip etika seperti keadilan, akurasi, dan keberimbangan informasi.

Lebih lanjut, Romadhon dan Firmansyah (2022) menjelaskan bahwa jurnalisme multimedia memiliki karakteristik khas berupa integrasi konten lintas platform dan kecepatan publikasi yang tinggi. Karakteristik ini membuat proses produksi berita menjadi lebih dinamis dan beragam format, namun juga berpotensi mengurangi kedalaman analisis serta keseimbangan perspektif jika tidak dikelola dengan baik dan tetap berpegang pada prinsip etika. Oleh karena itu, tantangan utama dalam jurnalisme multimedia bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana menjaga nilai-nilai etika tetap terjaga di tengah perubahan pola kerja tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip etika keadilan dalam praktik jurnalistik radio digital di era multimedia merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Perubahan teknologi dan pola konsumsi media telah membawa dampak signifikan terhadap cara kerja jurnalistik, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip keadilan tetap dapat diterapkan dalam situasi yang serba cepat dan terdistribusi di berbagai platform.

Dengan demikian, kajian mengenai penerapan prinsip etika keadilan dalam praktik jurnalistik radio digital di era multimedia menjadi penting untuk melihat sejauh mana media mampu mempertahankan nilai-nilai jurnalistik di tengah dinamika perubahan teknologi dan kebutuhan audiens yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip etika keadilan dalam praktik jurnalistik radio digital di era multimedia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena jurnalistik digital secara kontekstual berdasarkan pemikiran dan temuan ilmiah yang telah ada, khususnya yang berkaitan dengan etika jurnalistik, radio digital, dan transformasi media di era multimedia.



Metode studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal nasional yang relevan dengan topik jurnalistik radio digital, etika jurnalistik, dan prinsip keadilan dalam media. Sumber data diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah yang tersedia di Google Scholar, dengan kriteria jurnal yang membahas secara langsung maupun tidak langsung mengenai praktik jurnalistik di era digital serta penerapan prinsip etika keadilan dalam praktik jurnalistik radio digital. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan kesesuaian antara teori yang digunakan dan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mencatat konsep-konsep kunci, temuan penelitian, serta argumen teoritis dari jurnal-jurnal yang telah dipilih. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu jurnalistik radio digital, prinsip etika keadilan dalam jurnalistik, serta tantangan etika jurnalistik di era multimedia. Proses ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan menjaga keterkaitan antar konsep yang dibahas agar tetap fokus pada tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dalam jurnalistik radio digital. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk menggambarkan hubungan antar konsep dalam praktik jurnalistik di era multimedia. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan pemahaman konseptual mengenai penerapan prinsip etika keadilan dalam praktik jurnalistik radio digital berdasarkan hasil kajian pustaka.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran teoretis yang komprehensif mengenai penerapan prinsip etika keadilan dalam jurnalistik radio digital serta relevansinya dalam praktik produksi dan distribusi konten di berbagai platform multimedia, khususnya dalam konteks perkembangan media digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Keadilan Jurnalistik Radio Digital dalam Era Multimedia

1. Transformasi Etika keadilan Radio Konvensional ke Radio Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik jurnalistik radio di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis penyiaran, tetapi juga memengaruhi penerapan prinsip etika keadilan dalam kegiatan jurnalistik. Pada era radio konvensional, penerapan etika keadilan lebih berfokus pada bagaimana jurnalis menyampaikan informasi secara berimbang melalui siaran audio yang memiliki keterbatasan ruang interaksi dengan pendengar. Dalam sistem tersebut, proses produksi berita cenderung berjalan secara linear, sehingga pengawasan terhadap penerapan prinsip keadilan lebih mudah dilakukan karena distribusi informasi hanya melalui saluran penyiaran radio (Pramono & Setiawan, 2021; Hidayat & Kurniawan, 2022).

Transformasi menuju radio digital telah mengubah pola penerapan etika keadilan dalam praktik jurnalistik. Kehadiran website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital lainnya membuat informasi tidak lagi hanya disebarkan melalui siaran radio, tetapi juga melalui berbagai saluran komunikasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menuntut media radio untuk tetap menerapkan prinsip keadilan dalam setiap platform yang digunakan agar informasi yang



diterima masyarakat tetap memenuhi standar profesional jurnalistik (Rahmawati & Siregar, 2023; Nugraha & Wibowo, 2022).

Pada radio konvensional, penerapan etika keadilan lebih banyak diwujudkan melalui proses seleksi berita dan keberimbangan narasumber dalam siaran. Namun, pada radio digital, penerapan prinsip tersebut menjadi lebih kompleks karena media harus memperhatikan interaksi yang terjadi di ruang digital. Informasi yang dipublikasikan dapat memperoleh tanggapan langsung dari masyarakat melalui berbagai platform, sehingga media dituntut untuk lebih responsif terhadap kritik, klarifikasi, maupun hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar (Rizal & Pratiwi, 2021; Abdullah & Fadillah, 2023).

Perubahan lainnya terlihat pada mekanisme penyebaran informasi. Pada era radio konvensional, penyebaran berita berlangsung secara terbatas sesuai jadwal siaran yang telah ditentukan. Sebaliknya, radio digital memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan terus diperbarui sesuai perkembangan peristiwa. Situasi tersebut menyebabkan penerapan etika keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi pemberitaan, tetapi juga oleh kemampuan media menjaga kualitas informasi di tengah tuntutan kecepatan penyebaran berita (Santoso & Harun, 2022; Prasetyo & Mulyani, 2024).

Transformasi ini juga memengaruhi hubungan antara media dan audiens. Jika pada radio konvensional audiens cenderung berperan sebagai penerima informasi, maka pada radio digital audiens memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan tanggapan maupun kritik terhadap isi pemberitaan. Oleh karena itu, penerapan etika keadilan tidak lagi hanya diwujudkan melalui pemberitaan yang berimbang, tetapi juga melalui keterbukaan media dalam menerima masukan dan memberikan ruang yang proporsional kepada masyarakat (Anwar & Syahrul, 2022; Putri & Yuliana, 2023).

Meskipun mengalami perubahan, nilai dasar etika keadilan dalam jurnalistik radio tetap tidak mengalami perubahan. Prinsip seperti keberimbangan, penghormatan terhadap hak publik, serta penyampaian informasi yang tidak merugikan pihak tertentu tetap menjadi landasan utama dalam praktik jurnalistik. Perbedaannya terletak pada cara prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam lingkungan media yang semakin dinamis dan berbasis digital (Sari & Rahman, 2021; Hendra & Saputra, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi dari radio konvensional menuju radio digital tidak mengubah hakikat etika keadilan dalam jurnalistik, melainkan mengubah bentuk dan ruang penerapannya. Perkembangan teknologi dan karakteristik media digital menuntut media radio untuk mampu mengimplementasikan prinsip keadilan secara lebih adaptif agar kualitas informasi dan kepercayaan publik tetap terjaga di era multimedia.

2. Karakteristik Etika Keadilan Jurnalistik Radio Digital

Karakteristik etika keadilan dalam jurnalistik radio digital ditandai oleh komitmen media untuk menyajikan informasi secara berimbang di tengah arus informasi yang berlangsung sangat cepat. Meskipun tuntutan kecepatan menjadi salah satu ciri media digital, radio digital tetap dituntut untuk memberikan ruang yang proporsional kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pemberitaan yang berimbang menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi serta mencegah munculnya kecenderungan keberpihakan yang dapat



merugikan pihak tertentu (Prasetyo, 2024). Selain itu, prinsip keberimbangan merupakan bagian dari penerapan etika pers yang harus dipertahankan dalam jurnalisme digital agar kepentingan publik tetap terjaga (Nurhidayah, 2024).

Karakteristik lainnya adalah adanya penekanan terhadap akurasi dan verifikasi informasi sebelum berita dipublikasikan. Dalam lingkungan media digital yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat melalui berbagai platform, radio digital dituntut untuk tetap mengutamakan pemeriksaan fakta dan konfirmasi kepada sumber yang relevan. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika keadilan tidak hanya diwujudkan melalui keberimbangan informasi, tetapi juga melalui tanggung jawab media untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Suryanti & Apriadi, 2025). Penerapan akurasi dan verifikasi menjadi aspek penting dalam menjaga integritas serta kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat (Fitrianingsih et al., 2026).

Etika keadilan dalam jurnalistik radio digital juga ditandai dengan keterbukaan media terhadap hak jawab dan hak koreksi. Media radio digital tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi. Selain itu, media dituntut untuk bersedia memperbaiki kesalahan informasi secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab profesional kepada masyarakat. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap media (Persada, 2025; Dewan Pers, 2006).

Karakteristik berikutnya terlihat pada penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dalam praktik jurnalistik radio digital, kepentingan publik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses produksi dan penyebaran berita. Oleh karena itu, media tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan popularitas informasi, tetapi juga memperhatikan dampak pemberitaan terhadap masyarakat serta pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang benar merupakan bagian dari tanggung jawab sosial media dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya (Firdaus, 2025; Prasetyo, 2024).

Selain itu, etika keadilan dalam jurnalistik radio digital ditandai oleh kemampuan media untuk menjaga independensi dalam proses pemberitaan. Tingginya persaingan media digital sering kali menimbulkan tekanan terhadap redaksi untuk mengikuti kepentingan tertentu atau tren yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, prinsip keadilan menghendaki agar media tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan tidak membiarkan kepentingan tertentu memengaruhi objektivitas pemberitaan. Independensi media menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas informasi serta mencegah terjadinya bias dalam pemberitaan (Prasetyo, 2024; Fitrianingsih et al., 2026).

Karakteristik lainnya adalah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas media kepada publik. Interaksi yang terjadi melalui media sosial dan platform digital memungkinkan masyarakat memberikan kritik maupun masukan secara langsung terhadap isi pemberitaan. Kondisi tersebut menjadikan media radio digital harus lebih terbuka terhadap evaluasi publik serta lebih bertanggung jawab dalam setiap proses jurnalistik yang dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas media di tengah perkembangan



komunikasi digital yang semakin dinamis (Jehalut, Wutun, & Swan, 2026; Fitriyaningsih et al., 2026).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik etika keadilan dalam jurnalistik radio digital tidak hanya tercermin dari kemampuan media menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga dari komitmen untuk menjaga keberimbangan, akurasi, hak jawab, independensi, serta tanggung jawab kepada publik. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika keadilan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas media radio digital di tengah perkembangan era multimedia.

3. Implikasi Etika Keadilan terhadap Praktik Jurnalistik

Transformasi radio menuju era digital tidak hanya mengubah pola produksi dan distribusi informasi, tetapi juga membawa implikasi terhadap penerapan etika keadilan dalam praktik jurnalistik. Penerapan prinsip keadilan mendorong media radio digital untuk tidak hanya mengejar kecepatan penyampaian berita, tetapi juga memperhatikan aspek keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik dalam setiap proses jurnalistik. Dengan demikian, etika keadilan menjadi pedoman penting dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat (Prasetyo, 2024).

Salah satu implikasi dari penerapan etika keadilan adalah meningkatnya tuntutan terhadap proses verifikasi informasi. Dalam lingkungan media digital yang bergerak cepat, jurnalis radio dituntut untuk tetap melakukan pengecekan fakta dan konfirmasi kepada sumber yang relevan sebelum informasi dipublikasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika keadilan berdampak pada meningkatnya tanggung jawab profesional jurnalis dalam menjaga akurasi informasi yang diterima masyarakat (Fitriyaningsih et al., 2026).

Implikasi lainnya terlihat pada semakin pentingnya keberimbangan dalam pemberitaan. Radio digital dituntut untuk memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan bias maupun keberpihakan yang berlebihan. Penerapan prinsip tersebut menjadikan proses produksi berita tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang objektif dan dapat dipercaya (Prasetyo, 2024).

Penerapan etika keadilan juga berdampak pada meningkatnya tanggung jawab media dalam memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Dalam praktik jurnalistik radio digital, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berkewajiban menyediakan ruang klarifikasi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan informasi. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media (Dewan Pers, 2006).

Selain itu, implikasi etika keadilan terlihat pada meningkatnya tuntutan independensi dalam proses pemberitaan. Persaingan media digital dan tekanan popularitas sering kali memengaruhi arah pemberitaan. Oleh karena itu, penerapan etika keadilan mengharuskan jurnalis dan pengelola media untuk tetap menjaga objektivitas serta menghindari pengaruh kepentingan tertentu yang dapat mengurangi kualitas informasi yang disampaikan kepada publik (Prasetyo, 2024).



Penerapan etika keadilan juga mendorong media radio digital untuk lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan publik memberikan kritik maupun masukan secara langsung terhadap isi pemberitaan. Kondisi tersebut menjadikan media harus lebih responsif terhadap evaluasi masyarakat serta lebih bertanggung jawab dalam setiap proses jurnalistik yang dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas media di tengah perkembangan media digital yang semakin dinamis (Fitrianingsih et al., 2026).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan etika keadilan memberikan implikasi yang signifikan terhadap praktik jurnalistik radio digital. Implikasi tersebut tercermin dalam meningkatnya tuntutan terhadap akurasi, keberimbangan, hak jawab, independensi, serta akuntabilitas media kepada publik. Dengan demikian, etika keadilan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas jurnalistik radio digital di era multimedia.

Prinsip Etika Keadilan dalam Jurnalistik

1. Keberimbangan (Balance)

Prinsip keberimbangan merupakan salah satu unsur penting dalam etika keadilan jurnalistik. Keberimbangan tidak hanya dimaknai sebagai memberikan ruang yang sama kepada setiap pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa, tetapi juga sebagai upaya media untuk menghadirkan informasi secara proporsional berdasarkan fakta yang tersedia. Dalam praktik jurnalistik, keberimbangan diperlukan agar informasi yang diterima publik tidak hanya berasal dari satu sudut pandang, sehingga masyarakat dapat memahami suatu peristiwa secara lebih utuh dan objektif (Pratama & Wibowo, 2023).

Keberimbangan menjadi bagian penting karena media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Informasi yang disajikan secara tidak berimbang berpotensi menciptakan opini yang cenderung menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Oleh sebab itu, jurnalis dituntut untuk menghadirkan berbagai perspektif yang relevan agar pemberitaan tidak terjebak pada kecenderungan bias maupun keberpihakan yang berlebihan. Dalam konteks ini, keberimbangan bukan sekadar persoalan teknis pemberitaan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab etis media kepada masyarakat (Anggraeni, 2024).

Dalam era digital, penerapan prinsip keberimbangan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kecepatan arus informasi membuat media sering berada dalam tekanan untuk segera mempublikasikan berita sebelum memperoleh informasi secara lengkap dari seluruh pihak yang terlibat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan munculnya pemberitaan yang belum sepenuhnya berimbang karena proses konfirmasi belum dilakukan secara maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa tuntutan kecepatan dalam media digital sering kali berhadapan dengan kebutuhan menjaga kualitas dan etika jurnalistik (Fajarini & Santoso, 2025).

Dalam konteks jurnalistik radio digital, prinsip keberimbangan menjadi semakin penting karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform multimedia. Ketika sebuah informasi dipublikasikan melalui siaran radio, website, media sosial, maupun podcast secara bersamaan, dampak yang ditimbulkan juga menjadi lebih luas. Oleh sebab itu, upaya menghadirkan berbagai perspektif, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, serta



menghindari *framing* yang merugikan pihak tertentu merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip keadilan jurnalistik di era digital. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa keberimbangan bukan hanya menjadi standar profesional jurnalistik, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan praktik pemberitaan yang adil, objektif, dan bertanggung jawab kepada publik (Hartanto, 2022).

2. Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hak jawab dan hak koreksi merupakan prinsip penting dalam penerapan etika keadilan jurnalistik. Kedua prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menjadi objek pemberitaan memperoleh kesempatan yang adil dalam menyampaikan klarifikasi maupun memperbaiki informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam praktik jurnalistik, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pemberitaan yang berimbang, tetapi juga melalui kesediaan media memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Oleh karena itu, hak jawab dan hak koreksi menjadi bagian penting dalam menjaga tanggung jawab sosial media terhadap publik serta pihak yang diberitakan (Dewan Pers, 2006).

Hak jawab merupakan hak seseorang, kelompok, atau lembaga untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan kepentingannya. Melalui hak jawab, media memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan fakta dari sudut pandangnya sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih lengkap dan proporsional. Kehadiran hak jawab menunjukkan bahwa proses jurnalistik tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak yang terdampak untuk menyampaikan klarifikasi. Dengan demikian, hak jawab menjadi salah satu bentuk nyata penerapan keadilan dalam jurnalistik karena memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan tanpa kesempatan untuk memberikan penjelasan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999).

Dalam praktiknya, penerapan hak jawab tidak selalu mudah dilakukan. Kecepatan arus informasi sering kali membuat suatu berita menyebar luas sebelum pihak yang diberitakan memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan. Selain itu, tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap media untuk menyampaikan klarifikasi. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab untuk secara aktif memberikan ruang yang proporsional bagi pelaksanaan hak jawab agar keseimbangan informasi tetap terjaga dan masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai suatu peristiwa.

Selain hak jawab, hak koreksi juga menjadi prinsip penting dalam menjaga keadilan jurnalistik. Hak koreksi merupakan hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media. Prinsip ini menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan, pengolahan, maupun penyajian informasi. Kesediaan media untuk melakukan koreksi menunjukkan komitmen terhadap kebenaran informasi sekaligus penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999).

Pentingnya hak koreksi semakin terlihat ketika suatu pemberitaan mengandung kesalahan yang berpotensi merugikan individu maupun kelompok tertentu. Informasi yang tidak akurat



dapat menimbulkan kesalahpahaman, merusak reputasi, bahkan memengaruhi opini publik secara tidak tepat. Dalam situasi tersebut, koreksi menjadi langkah penting untuk memulihkan keakuratan informasi sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesalahan pemberitaan. Oleh karena itu, hak koreksi tidak dapat dipandang sebagai bentuk kelemahan media, melainkan sebagai wujud tanggung jawab profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Dalam era digital, tantangan terhadap penerapan hak jawab dan hak koreksi menjadi semakin kompleks. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform multimedia sehingga kesalahan informasi maupun pemberitaan yang tidak lengkap dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, klarifikasi atau koreksi yang disampaikan setelah berita dipublikasikan sering kali tidak memperoleh perhatian yang sama besar dibandingkan informasi awal yang telah terlanjur menyebar. Kondisi tersebut menuntut media untuk lebih proaktif dalam memberikan ruang hak jawab dan menyampaikan koreksi secara terbuka kepada publik.

Hak jawab dan hak koreksi juga memiliki hubungan yang erat dengan kredibilitas media. Kepercayaan publik terhadap media tidak hanya ditentukan oleh kemampuan media dalam menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga oleh kesediaannya untuk menerima kritik, memberikan ruang klarifikasi, serta memperbaiki kesalahan yang terjadi. Ketika media mampu menjalankan hak jawab dan hak koreksi secara konsisten, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan akan semakin tinggi. Sebaliknya, pengabaian terhadap kedua prinsip tersebut dapat menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan profesionalisme media.

Dalam konteks jurnalistik radio digital, hak jawab dan hak koreksi menjadi semakin penting karena informasi tidak hanya disampaikan melalui siaran radio, tetapi juga melalui website, podcast, dan media sosial. Kesalahan informasi yang dipublikasikan pada satu platform dapat dengan mudah tersebar ke berbagai platform lainnya. Oleh karena itu, media radio digital perlu menyediakan mekanisme yang jelas untuk menerima tanggapan, melakukan klarifikasi, serta memperbaiki informasi yang terbukti tidak akurat agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip etika keadilan dalam jurnalistik. Hak jawab memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan klarifikasi, sedangkan hak koreksi memastikan bahwa kesalahan informasi dapat diperbaiki secara terbuka dan bertanggung jawab. Kedua prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas informasi, kredibilitas media, serta kepercayaan publik terhadap praktik jurnalistik di era digital.

3. Akurasi dan Verifikasi Informasi

Akurasi dan verifikasi informasi merupakan prinsip mendasar dalam praktik jurnalistik yang memiliki keterkaitan erat dengan etika keadilan. Informasi yang akurat memungkinkan masyarakat memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu peristiwa, sedangkan proses verifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui pemeriksaan dan pengujian yang memadai. Dalam konteks etika jurnalistik, keadilan tidak hanya



diwujudkan melalui keberimbangan dan objektivitas, tetapi juga melalui komitmen media untuk menyampaikan fakta yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akurasi dan verifikasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima publik (Yunus & Pratiwi, 2022).

Prinsip akurasi menuntut jurnalis untuk menyajikan informasi berdasarkan fakta yang valid, bukan asumsi, dugaan, maupun spekulasi. Setiap informasi yang diperoleh dari narasumber harus diperiksa kembali melalui data, dokumen, atau sumber lain yang relevan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Langkah tersebut penting karena kesalahan informasi tidak hanya berdampak pada kredibilitas media, tetapi juga dapat merugikan individu, kelompok, maupun lembaga yang menjadi objek pemberitaan. Dalam perspektif etika keadilan, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menciptakan ketidakadilan karena masyarakat memperoleh pemahaman yang keliru terhadap suatu peristiwa.

Untuk menjaga akurasi, proses verifikasi menjadi tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam kerja jurnalistik. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran data, mengonfirmasi informasi kepada sumber yang relevan, serta membandingkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Melalui proses tersebut, media dapat meminimalkan risiko kesalahan informasi sekaligus memastikan bahwa berita yang dipublikasikan memiliki dasar fakta yang kuat. Dengan demikian, verifikasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis jurnalistik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral media kepada publik (Nasution & Kurniawan, 2023).

Dalam era digital, tantangan terhadap akurasi dan verifikasi semakin kompleks. Kemudahan akses informasi melalui internet memungkinkan berita menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan keuntungan karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara *real-time*. Namun di sisi lain, kecepatan distribusi informasi sering kali menciptakan tekanan bagi media untuk segera mempublikasikan berita sebelum proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, risiko munculnya kesalahan informasi menjadi lebih besar dibandingkan pada era media konvensional.

Bagi jurnalis radio digital, akurasi dan verifikasi memiliki arti yang sangat penting karena informasi yang diproduksi tidak hanya disebarkan melalui siaran radio, tetapi juga melalui website, podcast, dan media sosial. Kesalahan informasi yang dipublikasikan pada satu platform dapat dengan cepat menyebar ke platform lainnya dan menjangkau audiens yang lebih luas. Oleh karena itu, proses pengecekan fakta, konfirmasi sumber, serta validasi data harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan produksi berita.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akurasi dan verifikasi informasi merupakan elemen penting dalam penerapan prinsip etika keadilan dalam jurnalistik. Akurasi memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sedangkan verifikasi menjadi mekanisme untuk menguji dan memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Di tengah perkembangan radio digital dan arus informasi yang semakin cepat, kedua prinsip tersebut menjadi semakin penting untuk menjaga kredibilitas media, melindungi kepentingan publik, dan mewujudkan praktik jurnalistik yang adil serta bertanggung jawab.



Tantangan Penerapan Prinsip Etika Keadilan dalam Praktik Jurnalistik Radio Digital

1. Dilema antara Kecepatan dan Akurasi Informasi

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kerja jurnalistik secara signifikan. Dalam era multimedia, media dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan cepat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan berita secara *real-time*. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital membuat arus informasi bergerak sangat cepat sehingga media harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kondisi ini juga dialami oleh radio digital yang tidak lagi hanya mengandalkan siaran langsung, tetapi turut memanfaatkan website, podcast, dan media sosial sebagai sarana distribusi informasi.

Tuntutan kecepatan tersebut menjadi salah satu karakteristik utama media digital. Masyarakat saat ini cenderung menginginkan informasi yang dapat diperoleh secara instan tanpa harus menunggu jadwal siaran atau penerbitan berita seperti pada media konvensional. Akibatnya, media berlomba-lomba menjadi pihak pertama yang menyampaikan informasi kepada publik. Persaingan tersebut membuat kecepatan sering kali dianggap sebagai indikator keberhasilan media dalam menarik perhatian audiens dan mempertahankan eksistensinya di ruang digital (Aliah & Pratama, 2024).

Di sisi lain, praktik jurnalistik tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga menuntut akurasi informasi. Setiap berita yang dipublikasikan harus didasarkan pada fakta yang telah diverifikasi agar informasi yang diterima masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, muncul dilema yang cukup kompleks antara kebutuhan untuk segera menyampaikan informasi dengan kewajiban melakukan proses verifikasi secara menyeluruh. Dilema tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan etika jurnalistik di era digital. Kecepatan yang berlebihan berpotensi mendorong media untuk mempublikasikan informasi sebelum seluruh fakta berhasil dikonfirmasi. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya kesalahan informasi, kekeliruan data, maupun pemberitaan yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Jika hal tersebut terjadi, maka media tidak hanya menghadapi persoalan profesionalisme, tetapi juga persoalan etika karena informasi yang tidak akurat dapat merugikan pihak tertentu dan menyesatkan publik.

Dalam perspektif etika keadilan, informasi yang akurat merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh media. Publik berhak memperoleh informasi yang benar agar mampu memahami suatu peristiwa secara tepat. Oleh karena itu, setiap proses produksi berita harus mengedepankan prinsip verifikasi sebagai bagian dari tanggung jawab jurnalistik. Tanpa verifikasi yang memadai, media berisiko menyebarkan informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tantangan ini semakin besar karena perkembangan teknologi memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik.

Persaingan yang ketat dalam lingkungan media digital juga turut memengaruhi proses produksi berita. Dorongan untuk memperoleh jumlah pembaca, pendengar, atau interaksi yang tinggi sering kali membuat media berada dalam tekanan untuk terus memperbarui informasi secepat mungkin. Situasi ini dapat memunculkan kecenderungan mengutamakan kecepatan dibandingkan ketelitian dalam proses verifikasi. Padahal, prinsip etika jurnalistik menempatkan



kebenaran informasi sebagai prioritas utama dalam setiap pemberitaan (Hijriani & Nurcahyo, 2025).

Bagi radio digital, dilema tersebut menjadi semakin kompleks karena informasi tidak hanya disampaikan melalui siaran audio, tetapi juga melalui berbagai platform multimedia secara bersamaan. Sebuah informasi yang dipublikasikan pada website radio dapat langsung dibagikan melalui media sosial, diunggah dalam bentuk podcast, atau disebarluaskan melalui berbagai kanal digital lainnya. Akibatnya, dampak dari kesalahan informasi menjadi lebih besar dibandingkan ketika radio hanya beroperasi sebagai media penyiaran konvensional. Oleh karena itu, jurnalis radio digital dituntut untuk mampu menyeimbangkan kebutuhan akan kecepatan dengan tuntutan akurasi. Kecepatan memang penting dalam memenuhi kebutuhan audiens digital, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan proses verifikasi yang menjadi dasar profesionalisme jurnalistik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dilema antara kecepatan dan akurasi merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip etika keadilan pada jurnalistik radio digital. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, media tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi yang memadai. Dengan demikian, kecepatan dan akurasi tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang harus berjalan secara seimbang demi mewujudkan praktik jurnalistik yang adil, profesional, dan bertanggung jawab.

2. Tekanan Algoritma dan Persaingan Perhatian Audiens

Di era multimedia, persaingan antar media semakin ketat dalam memperebutkan perhatian audiens. Jumlah informasi yang melimpah dan akses yang mudah membuat pengguna media cenderung lebih selektif dalam memilih konten yang dikonsumsi. Kondisi ini menciptakan persaingan yang sangat tinggi, di mana setiap media berusaha menampilkan konten yang paling menarik, populer, dan banyak dicari orang. Tekanan untuk mendapatkan perhatian tersebut sering kali mengubah orientasi pemberitaan, di mana isi berita kadang disesuaikan dengan apa yang sedang tren atau disukai publik, bukan semata-mata berdasarkan nilai berita atau kepentingan umum (Suryadi & Pratama, 2023).

Tekanan ini semakin kuat dengan adanya peran algoritma di berbagai platform media sosial dan mesin pencari. Algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang mendapatkan banyak interaksi, seperti suka, komentar, dan bagikan, kepada lebih banyak orang. Akibatnya, media sering kali merasa harus mengikuti pola tersebut agar kontennya tetap muncul dan dilihat banyak orang. Hal ini menciptakan tekanan baru bagi jurnalis dan redaksi, di mana selain memikirkan isi berita, mereka juga harus memikirkan bagaimana membuat berita tersebut disukai sistem dan audiens. Dalam situasi seperti ini, ada risiko prinsip keadilan tergeser karena media lebih berfokus pada daya tarik konten dibandingkan kedalaman dan keseimbangan informasi (Wibowo & Anwar, 2024).

Pergeseran ini berdampak pada penerapan prinsip etika keadilan. Ketika media terlalu berorientasi pada apa yang disukai publik atau apa yang disukai algoritma, ada kecenderungan untuk mengabaikan isu-isu penting namun kurang populer. Sebaliknya, isu yang sensasional atau memancing emosi lebih diprioritaskan meskipun mungkin kurang mendalam atau kurang



berimbang. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mewajibkan media menyajikan informasi secara lengkap, berimbang, dan objektif, terlepas dari seberapa populer informasi tersebut di masyarakat.

Bagi radio digital yang beroperasi di berbagai platform, tantangan ini menjadi ganda. Mereka harus tetap mempertahankan standar jurnalistik di siaran utama, namun di sisi lain juga harus bersaing mendapatkan perhatian di media sosial yang sangat didorong oleh popularitas. Menyeimbangkan keduanya menjadi sulit, namun sangat penting agar prinsip keadilan tetap terjaga.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tekanan algoritma dan persaingan perhatian audiens merupakan tantangan nyata dalam penerapan prinsip keadilan. Media dituntut untuk tetap independen dan berpegang pada nilai jurnalistik, meskipun berada di tengah lingkungan yang sangat kompetitif dan berbasis popularitas. Prinsip keadilan harus tetap menjadi landasan utama agar media tidak hanya sekadar mengejar jumlah penonton, tetapi tetap berfungsi sebagai penyedia informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipercaya.

3. Penerapan Hak Jawab dan Hak Koreksi di Era Digital

Penerapan hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip etika keadilan dalam jurnalistik. Namun, perkembangan media digital menghadirkan berbagai tantangan yang membuat pelaksanaan kedua prinsip tersebut menjadi semakin kompleks. Kecepatan arus informasi dan tingginya persaingan antar media sering kali menyebabkan pemberitaan tersebar luas sebelum pihak yang diberitakan memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Akibatnya, informasi awal yang belum sepenuhnya lengkap dapat membentuk persepsi publik terlebih dahulu sebelum hak jawab diberikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang diterima masyarakat serta mengurangi efektivitas penerapan prinsip keadilan dalam pemberitaan (Sutanto, 2022).

Salah satu tantangan utama adalah kecepatan penyebaran informasi di ruang digital. Berita yang dipublikasikan melalui website, media sosial, maupun platform multimedia lainnya dapat menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Dalam situasi tersebut, media sering menghadapi keterbatasan waktu untuk memperoleh tanggapan dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan pentingnya hak jawab sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang dipublikasikan media (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999).

Tantangan yang berkaitan dengan efektivitas penyampaian hak jawab dan hak koreksi. Dalam banyak kasus, klarifikasi atau koreksi yang dipublikasikan setelah berita awal tidak memperoleh perhatian yang sama besar dari audiens. Informasi yang pertama kali diterima masyarakat cenderung lebih mudah diingat dibandingkan koreksi yang disampaikan kemudian. Akibatnya, upaya media untuk memperbaiki kesalahan atau memberikan ruang klarifikasi tidak selalu mampu menghilangkan dampak dari informasi yang telah terlanjur menyebar luas. Oleh karena itu, media perlu memastikan bahwa hak jawab dan hak koreksi disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat agar tujuan keadilan dalam pemberitaan dapat tercapai secara optimal (Dewan Pers, 2006).



Selain itu, karakteristik media digital yang bersifat multiplatform juga menimbulkan tantangan tersendiri. Informasi yang dipublikasikan melalui siaran radio dapat dengan cepat disebarluaskan kembali melalui media sosial, aplikasi pesan instan, podcast, maupun platform digital lainnya. Ketika terjadi kesalahan informasi, media tidak hanya perlu melakukan koreksi pada satu platform, tetapi juga harus memastikan bahwa klarifikasi dan perbaikan informasi dapat menjangkau audiens di berbagai saluran distribusi. Kondisi tersebut menuntut adanya tanggung jawab redaksional yang lebih besar dalam menjaga kualitas informasi dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hak jawab dan hak koreksi di era digital menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kecepatan informasi, efektivitas klarifikasi, serta karakteristik media yang semakin terintegrasi. Oleh karena itu, media radio digital perlu terus memperkuat mekanisme klarifikasi dan koreksi informasi agar prinsip etika keadilan dapat diterapkan secara optimal dalam praktik jurnalistik modern.

KESIMPULAN

Perkembangan radio digital telah mengubah praktik jurnalistik menjadi lebih cepat, interaktif, dan terintegrasi dengan berbagai platform multimedia. Di tengah perubahan tersebut, penerapan prinsip etika keadilan tetap menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik. Prinsip keadilan dalam jurnalistik radio digital dapat diwujudkan melalui keberimbangan pemberitaan, pemberian hak jawab dan hak koreksi, serta penerapan akurasi dan verifikasi informasi dalam setiap proses jurnalistik.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti tuntutan kecepatan penyebaran informasi, persaingan media digital, serta efektivitas pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi di berbagai platform. Oleh karena itu, media radio digital perlu tetap mengutamakan tanggung jawab profesional, menjaga kualitas verifikasi informasi, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh pihak yang terkait agar fungsi jurnalistik dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika dan kepentingan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis, peneliti, dan akademisi yang karya ilmiahnya menjadi sumber rujukan dalam penyusunan artikel ini. Berbagai pemikiran, temuan, dan kontribusi ilmiah yang telah dipublikasikan memberikan landasan penting dalam memperkaya analisis dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdjani, H., & Sari, D. (2021). Etika Jurnalistik dan Profesionalisme Wartawan dalam Media Digital. *Jurnal Komunikasi*, 13(1).
- Dewan Pers. (2006). *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Firmansyah, M., & Anwar, S. (2022). Pola Produksi Konten Multiplatform pada Media Radio Berbasis Teknologi Digital. *Kajian Jurnalisme*, 6(1), 78–94.
- Fitrianingsih, I., dkk. (2026). Tantangan Penerapan Etika Jurnalistik pada Media Online di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 9(1).



- Harliantara, Y. (2024). Perubahan Hubungan Media dan Audiens dalam Praktik Radio Digital di Indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 18(1), 45–60.
- Lubis, A., & Nasution, R. (2023). Pengaruh Algoritma dan Pasar Digital terhadap Independensi dan Objektivitas Media. *Jurnal Kajian Media*, 17(2), 201–216.
- Mufti Nurlatifah. (2020). Persimpangan Kebebasan Bereksprei dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Jurnal IPTEKKOM*, 22(1).
- Nasution, I., & Kurniawan, A. (2023). Mekanisme Verifikasi Fakta dalam Praktik Jurnalistik Media Penyiaran Berbasis Multimedia. *Kajian Komunikasi*, 11(2), 101–116.
- Persada, M. A. (2025). Analisis Potensi Pelanggaran Etika dan Hukum dalam Praktik Podcast Jurnalistik di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3).
- Prasetyo, D. (2024). Peran Kode Etik Jurnalistik dalam Menjaga Objektivitas Media Massa di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ritonga, R. (2018). Objektivitas Berita pada Media Massa dalam Perspektif Jurnalisme. *Jurnal Interaksi*, 7(2).
- Suharyanto, B., & Pratama, D. (2023). Transformasi Karakteristik Media Penyiaran: Dari Radio Konvensional Menuju Radio Digital Berbasis Multimedia. *Jurnal Komunikasi Penyiaran*, 9(1), 34–49.
- Suryanti, P., & Apriadi, E. A. (2025). Kecerdasan Buatan dalam Produksi Konten Jurnalistik: Analisis Etika dan Akurasi Komunikasi Berita Berbasis AI. *Journal Media Public Relations*, 5(1).
- Yunus, Y., & Pratiwi, R. (2022). Akurasi dan Verifikasi Informasi: Dasar Utama Keadilan dan Kredibilitas Berita di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, 10(1), 23–38.